

REGISTER RISIKO

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada						L	K	TR	PR	Rencana pengendalian yang harus dilakukan				Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL	
								Uraian	Desain/		Efektivitas		Jadwal											
									A	T	T	K	E					I	II	III	IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
1. Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)																								
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Terpenuhi jasa komunikasi, sumber air dan listrik	1.1.1	Pengeluaran melebihi anggaran yang tersedia	1.1.1.1	Verifikasi tidak dilakukan dengan teliti	C	Pertanggungjawaban pengeluaran tidak diterima oleh KPPN	Reviu atasan	√		√		√				Penguatan proses riviui atasan dan sosialisasi pentingnya data dukung RKAKL	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			1.1.2	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik tidak terpenuhi	1.1.2.1	Gangguan Teknis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	UC	Kegiatan operasional terganggu	Koordinasi	√		√		√				Peningkatan Koordinasi terhadap penyedia jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Sarana Kebersihan Kantor	1.2.1	Tidak Terpenuhi Sarana Kebersihan Kantor	1.2.1.1	Tidak Tersedia Sarana Kebersihan Kantor	C	Ketidaknyamanan Pegawai berada di kantor	Reviu atasan	√		√		√				Pembinaan Petugas Kebersihan, atau Penggantian Petugas Kebersihan	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terselenggaranya Peralatan Kerja	1.3.1	Tidak Terawatnya Peralatan Kerja	1.3.1.1	Keterlambatan Pengadaan perawatan Peralatan Kantor	C	Peralatan Kantor yang rusak tidak bisa digunakan	Reviu atasan	√		√		√				Penyesuaian waktu pengadaan Perawatan Kantor	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	1.4.1	Tidak Tersedianya Alat Tulis Kantor	1.4.1.1	Keterlambatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	C	Kegiatan Operasional dalam Penggunaan Alat Tulis Kantor Terganggu	Reviu atasan	√		√		√				Penekanan Penyediaan Alat Tulis Kantor menjadi lebih fleksibel	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	1.5.1	Tidak tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	1.5.1.1	Keterlambatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	C	Aktifitas Penggunaan Barang cetakan dan Penggandaan menjadi terganggu	Reviu atasan	√		√		√				Koordinasi Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.6	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	1.6.1	Tidak Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	1.6.1.1	Kekurangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	C	Aktifitas Ruangan di kantor gelap	Koordinasi	√		√		√				Peninjauan kembali komponen instalasi Listrik yang dibutuhkan	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko		C/UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada					L	K	TR	PR	Rencana pengendalian yang harus dilakukan				Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL		
									Uraian	Desain/		Efektivitas						Uraian	Jadwal						
										A	T	T	K						E	I	II			III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				(21)	(22)	
1.7	Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kantor	1.7.1	Tidak Tersedianya Kebutuhan peralatan Kantor	1.7.1.1	Kurangnya ketersediaan kebutuhan peralatan kantor	C	Aktifitas menjadi terhambat dalam kebutuhan peralatan kantor	Reviu atasan	√		√							Koordinasi Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.8	Terpenuhiya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.8.1	Tidak tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.8.1.1	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan kebutuhan	C	Tidak bisa digunakan untuk bahan bacaan dan dasar penggunaan peraturan perundang-undangan	Reviu atasan	√		√							Koordinasi dan evaluasi kembali bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.9	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai	Terpenuhiya Makanan dan Minuman Pegawai	1.9.1	Tidak Terpenuhiya Makanan dan Minuman Pegawai	1.9.1.1	Penyediaan Makanan dan Minuman pegawai tidak mencukupi hari kerja	C	Timbulnya kecemburuan antar pegawai karena kurangnya ketersediaan makanan dan minuman	Reviu atasan	√		√							Evaluasi kembali pemenuhan makanan dan minuman harian berdasarkan jumlah pasti pegawai	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.10	Terpeliharanya sarana dan fasilitas gedung kantor	Keadaan Sarana dan fasilitas gedung kantor lebih baik	1.10.1	Tidak terpeliharanya sarana dan fasilitas gedung kantor	1.10.1.1	Alokasi anggaran dari Pemerintah kota terbatas	C	Kondisi Sarana dan Fasilitas gedung kantor menjadi kurang enak dipandang mata	Reviu atasan	√		√							Penyesuaian anggaran yang terbatas dengan kondisi sarana dan fasilitas gedung kantor	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.11	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	Kondisi Kendaraan dinas/operasional terjaga dengan baik	1.11.1	Tidak terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1.11.1.1	Penggunaan Kendaraan dinas/operasional diluar jam kerja	C	Kondisi Kendaraan dinas/operasional tidak bisa digunakan	Reviu atasan	√		√							Pembuatan Aturan internal dalam hal penggunaan kendaraan dinas/operasional	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.12	Tertaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Keluar daerah	Terpenuhiya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1.12.1	Tidak terlaksana secara maksimal Rapat koordinasi dan konsultasi	1.12.1.1	Jadwal kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi daerah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi	C	Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi daerah menjadi tidak beraturan	Reviu atasan	√		√							Pemantapan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	√		√		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.13	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	Terpenuhiya Pakaian Dinas Pegawai	1.13.1	Tidak terpenuhiya pakaian Dinas Pegawai	1.13.1.1	Sebagian Pegawai sedang melakukan Dinas Luar	C	Hanya sebagian pegawai yang mendapatkan pakaian dinas	Reviu atasan	√		√							Diperlukan jadwal pengukuran pakaian dinas agar serentak	√		√		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko		C/UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada					L	K	TR	PR	Rencana pengendalian yang harus dilakukan				Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL		
									Uraian	Desain/		Efektivitas						Uraian	Jadwal						
										A	T	T	K						E	I	II			III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				(21)	(22)	
1.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1.14.1	Tidak terpenuhinya peralatan Rumah Tangga	1.14.1.1	Tidak tersedia nya anggaran	C	Tidak terpenuhinya peralatan rumah tangga	Reviu atasan	√		√						Dianggarkan Ulang kebutuhan rumah tangga	√		√			Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.15	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Tersedianya Pedoman SPIP OPD	1.15.1	Tidak terpenuhinya pedoman SPIP	1.15.1.1	Belum memahami pedoman penyusunan SPIP	C	Tidak terpenuhinya pedoman SPIP	Reviu atasan	√		√						Koordinasi antar bidang dan OPD terkait dalam pedoman penyusunan SPIP	√		√			Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat (Sub Bagian Keuangan)																									
2.1	Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya tertib jasa administrasi keuangan	1.2.1	Tidak Tertib Jasa Administrasi Keuangan	1.2.1.1	Verifikasi tidak dilakukan dengan teliti	C	Pertanggungjawaban pengeluaran tidak diterima oleh KPPN	Reviu atasan	√		√						Penguatan proses rivi atasan dan sosialisasi mekanisme verifikasi pertanggungjawaban pengeluaran anggaran	√	√	√	√		Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan
			1.2.2	Pengeluaran dipertanggungjawabkan lebih dari satu kali	1.2.2.1	Verifikasi tidak dilakukan dengan teliti	C	Terjadi kerugian keuangan daerah	Reviu atasan	√		√						Penguatan proses rivi atasan dan sosialisasi mekanisme verifikasi pertanggungjawaban						Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan
			1.2.3	Pengeluaran tidak didukung dengan bukti formal yang sah	1.2.3.1	Verifikasi tidak dilakukan dengan teliti	C	Terjadi kerugian keuangan Daerah	Reviu atasan	√		√						Penguatan proses rivi atasan dan sosialisasi mekanisme verifikasi pertanggungjawaban pengeluaran	√	√	√	√		Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan
			1.2.4	Terjadi ketekoran kas	1.2.4.1	Kesalahan dalam perhitungan dan pembukuan		Terjadi kerugian keuangan Daerah	Reviu atasan	√		√						Penguatan proses rivi atasan dan sosialisasi pengelolaan kas	√		√			Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan
2.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	2.2.1	Tidak tersedianya laporan Semesteran tepat pada waktunya	2.2.1.1	Kesalahan dalam perhitungan dan pembukuan	C	Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Semesteran tidak tersedia	Reviu atasan	√		√						Diperlukan Ketelitian dan Jadwal Kegiatan membuat Laporan Keuangan Semesteran	√		√			Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada					L	K	TR	PR	Rencana pengendalian yang harus dilakukan				Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL			
								Uraian	Desain/		Efektivitas						Uraian	Jadwal							
									A	T	T	K						E	I	II			III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				(21)	(22)	
	2.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.3.1	Tidak tersedianya laporan Akhir Tahun tepat pada waktunya	2.3.1.1	Kesalahan dalam perhitungan dan pembukuan	C	Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Akhir Tahun tidak tersedia	Reviu atasan	√		√					Diperlukan Ketelitian dan Jadwal Kegiatan membuat Laporan Keuangan Akhir Tahun	√		√			Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan
Sekretariat (Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (PEP))																									
	3.1	Penyusunan RENSTRA	Tersedianya Pedoman RENSTRA OPD	3.1.1	Tidak terwujudnya Laporan RENSTRA OPD	3.1.1.1	Dokumen Pelengkap tidak mendukung RENSTRA Kota	C	Pedoman RENSTRA OPD kurang konsisten dengan RENSTRA Kota	Reviu atasan	√		√					Diperlukan Koordinasi dan pengkajian ulang untuk mengkonsistenkan RENSTRA Kota dan OPD		√		√		Kasubbag PEP	Kasubbag PEP
	3.2	Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Tersedianya Pedoman RENJA	3.2.1	Tidak Terwujudnya RENJA	3.2.1.1	Tidak terlaksananya Koordinasi antar Bidang OPD	C	Pedoman RENJA kurang konsisten dengan RENJA	Reviu atasan	√		√					Diperlukan Penekanan Terhadap Bidang dalam menyusun RENJA	√	√	√	√		Kasubbag PEP	Kasubbag PEP
	3.3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Pengawasan yang lebih komperensif	3.3.1	Tidak terwujudnya Laporan Ikhtisar Capaian Kinerja	3.3.1.1	Tidak terlaksananya Koordinasi antar Bidang OPD	C	Adanya Kesalahan dan keterlambatan dalam penyampaian Data dari Bidang	Koordinasi	√		√					Diperlukan Koordinasi Kembali dengan penyamaan persepsi dalam hal koordinasi	√	√	√	√		Kasubbag PEP	Kasubbag PEP
2 BIDANG PENANAMAN MODAL (Sub Bidang Promosi Penanaman Modal)																									
	2.1	Promosi Investasi Daerah	Tersedianya bahan-bahan promosi investasi dan terlaksananya	2.1.1	Penyebaran Informasi tentang potensi dan peluang	2.1.1.1	Tidak ada informasi tentang potensi dan peluang	C	Terhambatnya pertumbuhan perekonomian daerah	Reviu atasan	√		√		√			koordinasi dengan pihak terkait tentang pentingnya	√	√	√	√		Kasi Promosi Penanaman Modal	Kasi Promosi Penanaman Modal
BIDANG PENANAMAN MODAL (Sub Bidang Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal)																									
	2.2	Penyusunan kebijakan Penanaman Modal (Raperda Pemberian Insentif dan	Tersedianya Raperda yang telah disusun	2.2.1	Deregulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan dalam	2.2.1.1	Tidak ada payung hukum tentang pemberian insentif dan kemudahan	C	Minimnya daya tarik investor untuk mendapatkan kemudahan dalam perizinan	Reviu atasan	√		√		√			koordinasi dengan pihak terkait tentang Perda pemberian insentif	√	√	√	√		Kasi Perencanaan Deregulasi Penanaman	Kasi Perencanaan Deregulasi Penanaman
BIDANG PENANAMAN MODAL (Sub Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah)																									
	2.3	Penyusunan Laporan Potensi dan Peluang Investasi Daerah	Tersedianya Laporan Informasi potensi dan peluang investasi daerah	2.3.1	Tidak adanya laporan potensi dan peluang investasi daerah	2.3.1.1	Tidak tersedianya buku laporan tentang potensi dan peluang investasi daerah	C	Tidak tersedianya informasi tentang potensi dan peluang investasi daerah	Reviu atasan	√		√		√			koordinasi dengan pihak terkait tentang potensi dan peluang investasi daerah	√	√	√	√		Kasi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah	Kasi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/ UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada							L	K	TR	PR	Rencana pengendalian yang harus dilakukan				Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL	
								Uraian	Desain/		Efektivitas			Uraian					Jadwal						
									A	T	T	K	E						I	II	III	IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				(21)	(22)	
3 Pengawasan dan Pengendalian (Sub Bidang Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi)																									
3,1	Penyusunan Laporan Perizinan	Pencapaian program	3.1.1	penyelesaian penyusunan laporan dapat terlambat	3.1.1.1	Menunggu data dari seksi perizinan	C	Pertanggungjawaban pengeluaran tidak diterima oleh KPPN	Reviu atasan	√		√			√				Monitoring penyelesaian penerbitan izin	√	√	√	√	Kasi Pengolahan data, Pelaporan dan sistem	Kasi Pengolahan data, Pelaporan dan sistem
			3.1.2	Format Laporan berbeda	3.1.2.1	Data perizinan yang berbeda	UC	Kegiatan operasional terganggu	Koordinasi	√		√			√				Memperbanyak referensi	√	√	√	√	Kasi Pengolahan data, Pelaporan dan sistem	Kasi Pengolahan data, Pelaporan dan sistem
			3.1.3	Daftar isi berbeda dengan OPD lain	3.1.3.1	Kreasi masing-masing personal	C	-	Reviu atasan										mencari format laporan yang baku	√	√	√	√	Kasi Pengolahan data, Pelaporan dan sistem	Kasi Pengolahan data, Pelaporan dan sistem
Pengawasan dan Pengendalian (Sub Bidang Informasi Pengaduan dan Peningkatan Layanan)																									
3.2	Bimbingan Sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal	Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi	3.2.1	Sosialisasi tidak terselenggara dengan baik	3.2.2.1	Anggaran yang tidak maksimal	UC	Pemahaman yang kurang untuk peserta	Reviu atasan	√		√			√				Perencanaan anggaran yang lebih baik	√	√	√	√	Kasi Informasi Pengaduan dan Peningkatan Layanan	Kasi Informasi Pengaduan dan Peningkatan Layanan
Pengawasan dan Pengendalian (Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian)																									
3.3	Kegiatan Survey Indeks Pelayanan Perizinan	Meningkatkan standar-standar pelayanan perizinan	3.3.1	Tidak Lengkap dokumen usulan penerbitan perizinan	3.3.3.1	Pembuatan usul perizinan melibatkan pihak lain (tidak langsung oleh whs)	C	Penerbitan Izin tertunda	Koordinasi	√		√			√				Memperbanyak brosur syarat penerbitan perizinan	√	√	√	√	Kasi Pengawasan dan Pengendalian	Kasi Pengawasan dan Pengendalian
				Survey tidak menghasilkan data yang akurat	3.3.3.1	Responden tidak menjawab secara lengkap pertanyaan yang disajikan	C	Pengolahan Data Hasil Surver tidak maksimal	Koordinasi	√		√			√				Menyebarkan angket survey yang mudah bagi responden untuk mengisinya	√	√	√	√	Kasi Pengawasan dan Pengendalian	Kasi Pengawasan dan Pengendalian
4 Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I)																									
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan lingkup Perizinan I	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan lingkup Perizinan I	4.1.1	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan tidak sesuai dengan SOP	4.1.1.1	Proses Pengajuan Izin yang tidak sesuai dengan persyaratan	C	Terjadi keterlambatan dalam penerbitan izin	Reviu atasan	√		√			√				Diperlukan aturan yang baku dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan	√	√	√	√	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II)																									
4.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan lingkup Perizinan II	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan lingkup Perizinan II	4.2.1	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan tidak sesuai dengan SOP	4.2.1.1	Proses Pengajuan Izin yang tidak sesuai dengan persyaratan	C	Terjadi keterlambatan dalam penerbitan izin	Reviu atasan	√		√			√				Diperlukan aturan yang baku dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan	√	√	√	√	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/ UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada							L	K	TR	PR	Rencana pengendalian yang harus dilakukan				Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL		
								Uraian	Desain/		Efektivitas			Uraian					Jadwal							
									A	T	T	K	E						I	II	III	IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)					
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III)																										
4.3	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan lingkup Perizinan III	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan lingkup Perizinan III	4.3.1	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan tidak sesuai dengan SOP	4.3.1.1	Proses Pengajuan Izin yang tidak sesuai dengan persyaratan	C	Terjadi keterlambatan dalam penerbitan izin	Reviu atasan	√		√							Diperlukan aturan yang baku dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan	√	√	√	√	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III	
4.4	Kegiatan Survey Lapangan Perizinan	Terselenggaranya izin survey di lapangan	4.4.1	Kegiatan survey terlambat	4.4.1.1	Alokasi Anggaran dari Pemerintah Kota terbatas	C	Izin tidak bisa diterbitkan	Reviu atasan	√		√							Diperlukan aturan yang baku dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan	√	√	√	√	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III	
5 Ketenagakerjaan (Sub Bidang Perluasan Penempatan Pelatihan dan Produktifitas)																										
5.1	Aplikasi IPK dan Bursa kerja online, entri data pencari kerja	Terselenggaranya aplikasi IPK dan bursa kerja online, entri data pencari kerja	5.1.1	Tidak terlaksananya kegiatan aplikasi kegiatan aplikasi IPK	5.1.1.1	Kurangnya pengaturan jadwal dan persiapan pelaksanaan	C	jumlah entri data pencari kerja sedikit/tidak memenuhi target	mediator mengeluarkan anjuran	√		√			√				Pentingnya dilakukan Bimtek penyelesaian perselisihan HI untuk para	√	√	√	√	Kasi Hubungan Industrial	Kasi Hubungan Industrial	
					5.1.2.1	Kurangnya Kompetensi SDM	C	Pelayanan pencari kerja kurang maksimal	Reviu atasan	√		√			√				Keningkatan kompetensi SDM	√	√	√	√	Kasi Perluasan penempatan pelatihan dan	Kasi Perluasan penempatan pelatihan dan	
					5.1.3.1	Kurangnya personil yang melaksanakan kerja	C	Pelaksanaan kegiatan kurang maksimal	Reviu atasan	√		√			√				Koordinasi dan komunikasi dalam tim dengan atasan lebih ditingkatkan	√	√	√	√	Kasi Perluasan penempatan pelatihan dan	Kasi Perluasan penempatan pelatihan dan	
5.2	Monitoring penempatan tenaga AKL, AKAD dan TKA	Terselenggaranya monitoring penempatan tenaga AKL, AKAD dan TKA	5.2.1	Tidak terlaksananya monitoring penempatan AKL, AKAD dan TKA	5.2.3.1	Waktu pelaksanaan yang tidak maksimal	C	Perusahaan yang dimonitoring sedikit sehingga data penempatan tenaga kerja kurang	koordinasi	√		√			√				Koordinasi dengan perusahaan lebih ditingkatkan	√	√	√	√	Kasi Perluasan penempatan pelatihan dan	Kasi Perluasan penempatan pelatihan dan	
					5.2.2.1	Perusahaan tidak kooperatif dalam memberikan informasi yang diminta	UC	Data perusahaan yang melaksanakan penempatan tenaga kerja tidak memenuhi target	koordinasi	√		√			√				Mengatur komunikasi dan koordinasi lebih baik antara petugas dengan perusahaan	√	√	√	√	Kasi Perluasan penempatan pelatihan dan	Kasi Perluasan penempatan pelatihan dan	
5.3	Pendidikan dan Pelatihan bagi pencari kerja	Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	5.3.1	Tidak terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	5.3.2.1	keterbatasan anggaran	C	Kegiatan tidak terlaksana secara maksimal	Reviu atasan	√		√			√				Koordinasi dan komunikasi dalam tim lebih ditingkatkan	√	√	√	√	Kasi Perluasan penempatan pelatihan dan	Kasi Perluasan penempatan pelatihan dan	
					5.3.3.1	sedikitnya peserta yang mendaftar untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	UC	Pencari kerja yang memiliki keterampilan tertentu sedikit	Reviu atasan	√		√			√					Perlunya sosialisasi bagi pencari kerja akan pentingnya arti keterampilan yang dimiliki untuk	√	√	√	√	Kasi Perluasan penempatan pelatihan dan	Kasi Perluasan penempatan pelatihan dan

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada					L	K	TR	PR	Rencana pengendalian yang harus dilakukan				Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL				
								Uraian	Desain/		Efektivitas						Uraian	Jadwal								
									A	T	T	K						E	I	II			III	IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				(21)	(22)		
Ketenagakerjaan (Sub Bidang Hubungan Industrial)																										
2.1	Kegiatan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terlaksananya kegiatan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	1.2.1	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam bentuk kasus perselisihan	1.2.1.1	Tidak terjadinya kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja / pihak	C	Diperlukan sidang mediasi sebanyak 3 kali pertemuan	Reviu atasan	√		√							Penguatan proses rivi atasan dan sosialisasi mekanisme verifikasi pertanggung-	√	√	√	√	Kasi Hubungan Industrial	Kasi Hubungan Industrial	
			1.2.2	Kasus penyelesaian perselisihan HI yg dapat diselesaikan melalui	1.2.2.1	Para pihak yg berselisih tetap pada pendirian masing-masing	UC	Kegiatan pelaksanaan mediasi perlu waktu 30 hari untuk penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	Mediator menyarankan agar dinekari	√		√							Pembinaan disetiap perusahaan-perusahaan oleh mediator					Kasi Hubungan Industrial	Kasi Hubungan Industrial	
2.2	Kegiatan Rakor dewan pengupahan Kota Pangkalpinang	Terlaksananya Rakor Dewan Pengupahan Kota Pangkalpinang untuk menerbitkan	2.2.1	Tidak terlaksananya upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku	2.2.1.1	Kurangnya pembinaan	C	Penerapan upah minimum oleh perusahaan-perusahaan yang tidak maksimal	koordinasi dengan pihak-pihak terkait	√		√							Sosialisasi upah minimum Kota (UMK)/ upah minimum Provinsi (UMP)Kep. Babel di Kota	√		√		Kasi Hubungan Industrial	Kasi Hubungan Industrial	
Ketenagakerjaan (Sub Bidang Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja)																										
3.1	Rakor lembaga kerjasama (LKS) tripartit dan survey lapangan reaksi cepat	Terjaganya hubungan industrial harmonis dan berkeadilan antara pengusaha	3.1.1	Penganggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) tidak sesuai	3.1.1.1	Yang merencanakan kegiatan bukan kasi Syarat Kerja dan jamsostek	C	Tidak terlaksananya pelaksanaan LKS Tripartit di Kota Pangkalpinang sesuai rencana	Koordinasi	√		√					4		Perencanaan anggaran mengacu pada permennaker yang berlaku serta			√	√	Kasi Syarat Kerja dan Jamsostek	Kasi Syarat Kerja dan Jamsostek	
			3.2.1	Tidak terlaksananya kegiatan survey lapangan reaksi cepat	3.2.1.1	Tidak adanya kasus dilapangan yang masuk kategori tim reaksi cepat	UC	Tidak cairnya anggaran honor kegiatan tim survey lapangan reaksi cepat	Koordinasi	√		√						4		Perencanaan Anggaran tidak diperhitungkan secara matang	√	√	√	√	Kasi Syarat Kerja dan Jamsostek	Kasi Syarat Kerja dan Jamsostek
3.3	Rakor lembaga dewan pengupahan Kota Pangkalpinang	Terbentuknya dewan pengupahan dikota Pangkalpinang	3.3.1	Tidak terlaksananya pencairan anggaran karena perencanaan	3.3.1.1	Perhitungan kebutuhan dan pencairan anggaran per triwulwn tidak dikalkulasi	C	Terlambatnya bpencairan atau tidak terserapnya anggaran secara maksimal	Koordinasi	√		√						4		Perencanaan anggaran tidak diperhitungkan secara matang	√	√	√	√	Kasi Syarat Kerja dan Jamsostek	Kasi Syarat Kerja dan Jamsostek

Keterangan:

30 risiko terbesar berdasarkan hasil penilaian risiko.
risiko lainnya yang teridentifikasi

Keterangan :

UC (Uncontrollable) = Sebab risiko bersumber dari eksternal
C (Controllable) = Sebab risiko bersumber dari internal

TR : Tingkatan Risiko
PR : Prioritas Risiko
M : Kemungkinan pengaruh
G : Dampak

A : Ada
T : Tidak ada
TE : Tidak Efektif
KE : Kurang Efektif
E : Efektif